

STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN (KARLAHUT) TAHUN 2015

**Oleh :
Muhammad Rizwan Amin
(Rizwanpro10@gmail.com)**

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-Tlp/Fax
0761 - 63277

Abstract

This research is based on issues of land and forest fires occurring every year in Rokan Hilir Regency. This study also reviewed in 2015 because it was based on Bupati Regulation made in 2011, after 4 Year Regulation of Regent running, the authors see various causes of development and problems that occur related to prevention of land and forest fires in Rokan Hilir Regency in 2015 with the prevention which has been done but the fire point is still widely found.

The types and methods used are qualitative research. Location and time of research conducted in Rokan Hilir Regency in 2015. Technique of collecting data of this research that is by doing interview and documentation equipped with supporting data obtained from mass media. Interviews were conducted with BPBD, SATLAKDALKARLAHUT, BLH, and other relevant agencies participating in the prevention of land and forest fires in Rokan Hilir District in 2015.

The results of this study explain that the government of Rokan Hilir Regency and related fires and forest fires less than the maximum in prevention is evidenced by the number of hotspots through TERRA satellite reaching 733 hotspots. Since the regent regulation that has been made to form SATLAKDALKARLAHUT in 2011 and has 4 years running until 2015. According to data BPBD also still many obstacles that can not be overcome by the government and SATLAKDALKARLAHUT in 2015.

Keywords: Policy, Government, Land and Forest Fire

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang ditandai dengan penjaralan api dengan bebas serta mengkonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya.¹ Adapun faktor penyebab terjadinya kebakaran lahan dan hutan menurut Ade yeti dalam buku Bencana Alam (Kebakaran) yaitu:

1. Kebakaran karena disengaja
2. Kebakaran karena faktor ketidaksengajaan
3. Kebakaran hutan disebabkan sambaran petir
4. Kebakaran dibawah tanah

Upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan dikabupaten Rokan Hilir tahun 2015:

1. Penggalangan sumber daya manusia
 2. Identifikasi dan pemetaan sumber air
 3. Dukungan dana
 4. Sarana dan Prasarana
1. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor 31 tahun 2011 tentang pembentukan satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Rokan Hilir :
Pasal 1
 - f. Penanggulangan kebakaran hutan dan/ atau lahan adalah semua usaha tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan meluasnya kebakaran hutan dan/atau lahan.
 - g. Pengendalian kebakaran hutan dan/ atau lahan adalah semua usaha baik

pencegahan, pemadaman dan penyelamatan akibat kebakaran hutan dan/ atau lahan.

pemerintah harus melakukan pencegahan dan deteksi dini lebih efektif agar tidak banyak lagi kerugian yang diperoleh baik kerugian dari pemerintah maupun masyarakat. Kebakaran lahan dan hutan sudah sering terjadi hingga saat ini. Kebijakan dan pencegahan juga telah diterapkan, namun pemerintah beserta instansi terkait belum bisa menuntaskan kebakaran lahan dan hutan. Kebakaran terus saja terjadi setiap tahunnya titik permasalahan ada pada kebijakan yang belum optimal, pencegahan yang belum merata, dan koordinasi yang belum sesuai harapan.

Tinjauan Teori

1. Kebijakan

Hodgetts dan Wartman dalam Ndraha berpendapat bahwa kebijakan (*business policy*) itu bertingkat–tingkat dan tersusun secara vertikal. Struktural, mulai dari kebijakan yang bersifat umum sampai pada kebijakan yang bersifat praktikal dan kongkrit. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarah pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan prewit dalam Subarsono kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang bercirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari membuatnya maupun yang mentaatinya. Selanjutnya Titmus mendefenisikan kebijakan sebagai prinsip–prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan pada tujuan–tujuan tertentu.²

¹ Nuryantini, ade yeti. *Bencana Alam (Kebakaran)*. (Penertbit: Karya Putra Darwati)

² Subarsono, AG 2005. *Analisa kebijakan publik konsep, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar). Hlm 2

Michael Howlet dan M Ramseh menyatakan bahwa proses kebijakan public terdiri dari lima tahapan sebagai berikut ini :

- a. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan – pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah, pemerintah memerlukan kebijakan menurut Ndaraha, kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik, dan moral. Diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan. Secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian menurut karsil dan kristine kebijakan merupakan ketentuan–ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi usaha yang dilakukan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah untuk

mewujudkan kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan. Berdasarkan kamus ilmiah populer, ”kebijakan” berasal dari kata “Bijak” yang berarti pandai mempergunakan akal, cidekia.³ James E. Anderson dalam wahab memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.⁴ Pendapat yang lain adalah dari Carl Friedrich dalam Wahab yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan–hambatan tertentu seraya mencari peluang–peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁵

James E. Anderson dalam wahab memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.⁶ Pendapat lain adalah dari Carl Friedrich dalam wahab yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan–hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁷

Bentuk–bentuk analisa kebijakan :

³ Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), Hal. 73

⁴ Wahab, Solichin Abdul, 2004. *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta Hal. 2.

⁵ Ibid, hal. 3.

⁶ Wahab, Solichin Abdul, 2004, *Analisa Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 2

⁷ Ibid, hal. 3

1. Retrospektif : Mengetahui apa yang telah terjadi dan perbedaan apa yang dibuat.
2. Prospektif : Mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan.
3. Formulasi : Mengetahui masalah apa yang harus dikerjakan
4. Implementasi : memecahkan masalah⁸

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana upaya pemerintah terhadap pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2015 berdasarkan kebijakan yang telah dibuat.

Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015.

Metode Penelitian

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif .

Taylor dan bogdan, menyatakan bahwa Penelitian kualitatif dapat

diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata – kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang – orang yang diteliti⁹

1. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang di peroleh dari proposal ini ialah data primer dan data sekunder yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya dan merupakan bahan utama peneliti, yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data lewat orang lain atau lewat dokumen. Data primer ini diperoleh melalui beberapa cara seperti observasi, wawancara. Sumber primer ini dapat dengan cara memberi beberapa pertanyaan

sehingga mendapatkan hasil atau data yang diinginkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui arsip atau dokumen tentang penelitian dan bisa didapat melalui Koran, Internet, Jurnal dan lain sebagainya. Data sekunder ini bersifat untuk melengkapi data primer dan data sekunder ini juga bisa menambah bukti yang akurat untuk menunjang hasil penelitian.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data didalam penelitian yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan mampu memberikan informasi yang akurat kepada peneliti

⁸ William N. dunn, 1981. *analisa kebijakan*. (Yogyakarta: PT Hanindita).

⁹ Emmy Susanti Hendrarso, 2005. *Penelitian Kualitatif: Sebuah pengantar*. Pranada media: Jakarta

terkait permasalahan penelitian. Informasi penelitian ini adalah orang yang dianggap penuliss yang banyak mengetahui tentang masalah yang penulis teliti. Adapun teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah *Purposives sample*.

Purposive Sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Langkah–langkah untuk menentukan sampel dalam buku yang di tulis ada beberapa langkah yaitu :

- a. Populasi, merumuskan dengna jelas populasi dari surve
- b. Populasi sasaran, menentukan sasaran populasi yang dimintai pendapatnya (*target population*)
- c. Kerangka sampel, setelah mendapat sasaran kemudian membuat kerangka sampel yaitu daftar nama dari populasi sasaran

Adapun informan penelitian yang penulis ambil ialah :

Tabel 1.5. Informan Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

No.	NAMA / (JABATAN)	JUMLAH
1.	Ir. Nahrowi (Sekretaris BPBD)	1
2.	Syahrul. Skm (Kasi Kerusakan Lingkungan)	1
3.	Irsyadul Anam (Konsultan UNOPS)	1
4.	Sulta Wira Praja (Kabid Kerusakan Lingkungan)	1
5	Yudistira (KASUBAG Keuangan dan Perlengkapan)	1
6	Muslikh (KA. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1

Sumber : Data Olahan Lapangan

Teknik pengumpulan data yaitu membicarakan tentang bagaimana cara peneliti mengumpulkan data, tujuannya untuk mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan sehingga mendapatkan data yang objektif dan akurat. Dalam penelitian ini menulis melakukan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yaitu :

- a. Teknik Observasi

Metode observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena–fenomena yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini penulis terjun secara langsung untuk mengamati situasi lingkungan di Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Wawancara (interview)

Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang

didasari pada percakapan secara insentif dengan satu tujuan. Selanjutnya menurut sudjana wawancara adaah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antar pihak penanya dengan pihak yang ditanya atau penjawab.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, leger, agenda agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis peroleh dari arsip dan data yang berhubungan dengan kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir.

Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis buat yaitu dilakukan dengan analisis kualitatif, Analisis data kualitatif, bidgan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang mudah dipahami sehingga temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

HASIL PENELITIAN

3.1. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan.

Langkah atau kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk pencegahan kebakaran lahan dan hutan

adalah pembentukan regu penanggulangan kebakaran lahan dan hutan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 tahun 2011. Dan regu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan mempunyai tanggungjawab penuh terkait kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir.

3.1.1. Pembentukan Satuan Pelaksana yang Terlibat Dalam Kegiatan Pencegahan.

Ditingkat satuan pelaksana (SATLAK), yang terlibat dalam kegiatan pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015 yaitu:

1. Satuan Pelaksana Kebakaran Lahan dan Hutan (SATLAKDALKARLAHUT) dari tingkat Kabupaten.

Di Kabupaten Rokan Hilir pemerintah membentuk Satuan Kebakaran Lahan dan Hutan ini berkedudukan di Kantor Bupati Rokan Hilir. SATLAKDALKARLAHUT ini akan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun tugas SATLAKDALKARLAHUT yaitu :

- a. Menggerakan Dinas/Instansi terkait, koordinasi dengan organisasi tertentu dan menjalin kerjasama dengan para ahli/pakar dalam upaya mencegah dan mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Dinas dan Instansi terkait yang ada Di Kabupaten Rokan Hilir masing-masing ikut dalam kegiatan pencegahan kebakaran lahan dan hutan, dan komunikasi dari atas

kebawah sebagai mana yang terjadi dilapangan dalam mencegah kebakaran lahan dan hutan baik atau tidak terlalu banyak kendala pada komunikasi dari atas kebawah begitu juga sebaliknya. Sehingga kegiatan pencegahan dapat dilaksanakan karena adanya komunikasi yang baik. Menurut Ir. Nahrowi selaku sekretaris BPBD yaitu :

Kalau komunikasi pada tahun 2015 berjalan dengan baik, tidak terlalu banyak kendala atau distorsi komunikasi karena setiap ada kegiatan pencegahan kami selalu memberitahukan kepada Dinas/Instansi lain dan terkait pencegahan tersebut kami membuat laporan yang akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten Rokan Hilir.¹⁰

Satuan Pelaksana Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan telah melakukan tugasnya dalam mengkoordinasikan serta menginformasikan kepada pemerintah maupun Instansi terkait hanya. Hal ini dapat dibuktikan dari data olahan yang dibuat oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan berupa Laporan akhir ditahun 2015 yang isinya lengkap dan titik hotspot dibuat dalam hitungan perhari. Dimana laporan ini setiap bulannya akan diserahkan kepada pemerintah dan data yang didapat pemerintah setiap bulan akan disusun menjadi jangka satu tahun.

- b. Mendukung kelancaran biaya operasional pengendalian kebakaran lahan dan hutan, dan mencari sumber-sumber atau bantuan dana lainnya yang tidak mengikat. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD bahwa penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Rokan Hilir yaitu Rp. 270.238.000. Nominal uang yang telah disebutkan terbilang kurang dalam melakukan pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan informasi yang didapatkan pada Sulta Wira Peraja KABID Kerusakan Lingkungan :

Memang saat ini pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengalami kendala pada keuangan, karena sekarang memang banyak terjadi kasus-kasus lain sehingga pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendanaan pada kasus kebakaran lahan dan hutan.¹¹

2. Regu pemadam kebakaran lahan dan hutan (REGDAMKARLAHUT) dari Operasional Perusahaan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2015 bekerja sama dengan perusahaan untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan. Untuk REGDAM yang dapat dikerahkan oleh perusahaan ditahun 2015 yaitu sebanyak 20 sampai 24 orang, dalam satu regu di bawah 1 komando yang bertugas memadamkan kebakaran

¹⁰ Wawancara dengan Ir. Nahrowi Sekretaris BPBD tanggal 23 September 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sulta Wira Peraja KABID Kerusakan Lingkungan tanggal 13 September 2017 di Kantor BPBD Kabupaten Rokan Hilir.

lahan dan hutan. Sekretaris BPBD Ir. Nahrowi menyebutkan :

Perusahaan ada membantu untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun yang dijanjikan harusnya 20 sampai 24 orang saat terjadinya kebakaran lahan dan hutan hanya berjumlah 5 orang, dan berbagai alasan kami terima dari perusahaan tersebut. jadi meskipun begitu kami tetap harus memadamkan api meskipun kekurangan personil membuat waktu pemadaman akan lebih lama.¹²

3. Regu Pemadam Kebakaran Lahan Dan Hutan dari unsur masyarakat terhimpun dalam satu wadah yang disebut Masyarakat Peduli Api (MPA). Pemerintah sangat menyayangkan MPA yang telah dibentuk di tingkat masyarakat ini. Karena partisi masyarakat sangat kurang bahkan sampai dikatakan tidak ada. Masyarakat tidak ikut dalam membantu memadamkan kebakaran lahan dan hutan yang terjadi jika diwilayah bukan milik mereka. Masyarakat hanya ikut membantu jika kebakaran tersebut terjadi pada lingkungan mereka saja. Sehingga Satuan Pelaksana Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan beserta Dinas/Instansi lainnya melaksanakan pemadaman kebakaran lahan dan hutan tanpa bantuan masyarakat apabila itu terjadi dikawasan perusahaan atau hutan liar.

3.1.2. Sistem Informasi kebakaran lahan dan hutan.

Yang dimaksud dalam sistem informasi ini ialah untuk mengetahui informasi terkait hotspot (titik api) yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. informasi terkait hotspot akan di distribusikan melalui internet. Sehingga memudahkan untuk memantau titik api yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. informasi hotspot ini bisa didapatkan oleh semua orang dan bisa di *Download* melalui *Playstore* yang aplikasinya bernama “LAPAN: FIRE HOTSPOT”. Aplikasi yang disediakan oleh negara singapura ini cukup mudah digunakan sehingga semua orang dapat memantau dengan mudah bagai mana reaksi Hotspot sedang berlangsung. Jika ada Hotspot yang terpantau maka aplikasi akan mengeluarkan notifikasi kepada pemilik Smartphone untuk memberitahukan dimana dan berapa jumlah Titik api yang terpantau oleh satelit. Program pemantauan titik api melalui aplikasi Smartphone ini telah digunakan oleh Satuan Pelaksa Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Kabupaten Rokan Hilir dan saat ditinjau dilapangan seluruh Satuan Pelaksana sudah bisa menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Singapura ini karena penggunaannya yang begitu mudah.

3.1.3. Sarana yang digunakan satuan pelaksana untuk pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Rokan Hilir.

Berbagai alat tentunya diperlukan untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan apalagi saat musim kemarau pemerintah perlu menyediakan alat untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Menurut

¹² Wawancara dengan Ir. Nahrowi Sekretaris BPBD tanggal 23 September 2017 di

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

laporan yang ditulis oleh BPBD, Kabupaten Rokan Hilir hanya memiliki 2 Unit mobil pemadam kebakaran dan 2 Unit mesin air yang digunakan “Khusus” untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan. meskipun dapat bantuan dari pihak lain seperti Helikopter dari Provinsi atau Alat berat dari Perusahaan, faktanya saat ditinjau dilapangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir hanya memiliki 2 Unit mesin air dan Mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan dalam memadamkan kebakaran lahan dan hutan. dari 16 kecamatan, seharusnya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu menyediakan masing-masing kecamatan minimal 1 Unit mobil pemadam kebakaran dan 1 Unit mesin air agar dapat digunakan oleh pihak kecamatan dalam mencegah kebakaran lahan dan hutan sebelum api mulai membesar dan meluas. Setelah melakukan hasil wawancara, ternyata dana adalah masalah yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memperbanyak jumlah personil agar dapat menutupi kekurangan alat yang disebabkan karena kurangnya dana yang dibutuhkan untuk pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

3.1.4. Sosialisasi kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Rokan Hilir

Berbagai jenis sosialisasi dibuat oleh pemerintah kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan. Kegiatan sosialisasi yang termasuk dalam kegiatan pencegahan ini ditujukan oleh masyarakat agar masyarakat dapat mengerti betapa bahayanya kebakaran lahan dan hutan. Adapun sosialisasi yang pernah dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yaitu :

1. Pembuatan spanduk kebakaran lahan dan hutan

Pembuatan spanduk yang berisi tentang larangan membakar lahan dan hutan dibuat dengan menarik agar masyarakat tertarik membacanya. Saat tinjauan dilapangan setiap kecamatan sudah memasang spanduk kebakaran lahan dan hutan sebagai bentuk pencegahan agar dapat mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan dan hutan karena dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, dan juga mengingatkan masyarakat agar tidak ceroboh membuang puntung rokok sembarangan, meninggalkan api bekas perkemahan, dan lain sebagainya.

2. Sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menghimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan dan hutan dan disampaikan secara langsung. Dalam kegiatan sosialisasi kebakaran lahan dan hutan tahun 2015 di setiap kecamatan ini tidak hanya dihadiri oleh Satuan Pelaksana Kebakaran Lahan dan Hutan saja, melainkan TNI, POLRI, UNOPS, Dinas/Instansi dan tokoh masyarakat juga ikut serta menyampaikan pendapat serta himbauan kepada masyarakat guna menambah wawasan serta mengingatkan masyarakat terkait kebakaran lahan dan hutan.

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dilakukan secara bergilir disepanjang tahun 2015, harapan Satuan Pelaksana Kebakaran Lahan dan Hutan terhadap sosialisasi ini tentunya dapat berdampak positif dan mencegah masyarakat untuk tidak membakar lahan dan hutan. Pemerintah juga berharap agar masyarakat juga ikut serta untuk dapat ikut berpartisipasi dalam mencegah

kebakaran lahan dan hutan dan menjaga lingkungan mereka agar tetap stabil. Namun yang terjadi saat ini tidak sesuai harapan karena masyarakat saat terjadinya kebakaran lahan dan hutan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan kebakaran lahan dan hutan sehingga pemerintah perlu menggalakkan masyarakat agar mau berpartisipasi bersama Satuan pelaksana kebakaran lahan dan hutan sehingga pemadaman lebih cepat dilakukan sebelum api mulai membesar dan meluas.

3.2. Hambatan dan Usulan Dari Tinjauan lapangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Terkait Kebakaran Lahan dan Hutan.

Pemerintah dan masyarakat tentunya ingin menyelesaikan masalah kebakaran lahan dan hutan ini secara tuntas dan tidak akan terjadi lagi ditahun – tahun berikutnya. Namun tentu tidak berjalan dengan mudah, ada berbagai macam hambatan yang terjadi dilapangan dapat ditemukan tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka diperlukannya usulan agar dapat diatasi dan melakukan perbandingan agar dapat melihat apakah usulan tersebut sesuai dengan hambatan yang ditemukan sehingga dapat diatasi. berikut adalah hambatan, usulan, serta perbandingan dari tinjauan lapangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terkait kebakaran lahan dan hutan.

3.2.1. Hambatan dan dari tinjauan lapangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terkait kebakaran lahan dan hutan.

Terdapat berbagai hambatan dalam kegiatan pencegahan kebakaran lahan dan hutan, seperti yang kita tahu bahwa pencegahan adalah suatu

tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan sebelum meluas atau melakukan tindakan yang sesuai dengan prediksi api yang akan muncul sehingga sama sekali tidak terjadi kebakaran lahan dan hutan. untuk melakukan pencegahan tersebut hambatan yang telah ditemukan Satuan Pelaksana Kebakaran Lahan dan Hutan harus dianalisis sehingga dapat diatasi pada masa yang akan datang. Hambatan yang terjadi saat dilapangan yaitu:

1. Kebakaran bawah tanah (Ground Fire) pada lahan gambut.

Sebagian besar kebakaran yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir adalah lahan gambut hal ini disebabkan karena kemarau yang berkepanjangan dan mengubah lahan gambut yang basah menjadi kering, lahan gambut yang kering tersebut akan menumpuk dan menghasilkan panas yang memicu timbulnya api, dan api menggunakan tumpukan gambut tersebut sebagai bahan bakar sehingga api akan terus hidup dan meluas di areal gambut kering. Hasil temuan dilapangan menyebutkan bahwa memadamkan api yang berada dibawah tanah jauh lebih sulit dibandingkan api yang berada diatas tanah, hal ini disebabkan karena sulitnya mendeteksi api yang berada dibawah tanah. Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Syahrul,SKM. Mengatakan :

Api yang berada dibawah tanah sangat sulit untuk kami padamkan karena apii yang tidak terdeteksi. saat kami melakukan pemadaman, diarea titik api yang sudah membesar, tiba – muncul api baru yang tidak jauh lokasinya dan api tersebut naik keatas dan

*membakar pohon serta tanaman yang ada di atasnya. Api tersebut berasal dari bawah tanah yang belum terdeteksi oleh kami.*¹³

Maka dari itu ketika api yang di atas sudah padam akan timbul api baru di area lain, dan apabila pemadaman juga sudah dilakukan saat tanah mulai kering akan ada lagi api yang muncul di tempat tersebut karena pada dasarnya api yang menyala berada di bawah tanah dan tidak terdeteksi keberadaannya.

2. Tidak ada sumber air yang diperlukan

Sumber air sangat penting dalam pemadaman kebakaran lahan dan hutan oleh karena itu agar proses pemadaman lebih cepat dilaksanakan maka diperlukan sumber air yang banyak dan pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk mencari sumber air terdekat. Ada dua fungsi air dalam kebakaran lahan dan hutan.

a. Air untuk memadamkan api

Seperti biasanya pemadam kebakaran lahan dan hutan menggunakan air untuk memadamkan api yang menyala pada hutan dan lahan. Akan tetapi air merupakan kendala yang sering dihadapi oleh pemadam kebakaran lahan dan hutan hal ini disebabkan dilapangan terbatasnya air yang dapat dipakai sehingga menghambat proses pemadaman. Untuk itu pencegahan yang harus dilakukan adalah berpartisipasi dengan masyarakat mencari sumber air terdekat terutama pada area yang rawan akan kebakaran lahan dan hutan sehingga saat terjadinya kebakaran Pemadam Kebakaran Lahan

dan Hutan bisa mendapatkan air yang cukup untuk memadamkan api.

b. Air untuk dialirkan kelahan gambut

Mengalirkan air pada lahan gambut sangat dibutuhkan untuk kegiatan pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Pemerintah belum ada melakukan tindakan pengaliran air di area lahan gambut hal ini disebabkan karena membutuhkan air yang cukup banyak namun hal ini harus dilakukan, karena jika lahan gambut terus basah maka kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan akan semakin sedikit. Maka dari itu pemerintah harus menyiapkan sumber air yang cukup untuk dialirkan ke tempat yang rawan akan kebakaran lahan dan hutan.

3. Pola Penjalaran Api

Temuan saat dilapangan yaitu sulitnya mengetahui pola penjalaran api, yang timbul hanya asap putih yang kemudian tanpa disuga muncul api loncat yang timbul karena pengaruh angin yang sulit dikendalikan. Pada intinya Satuan Pelaksana Kebakaran Lahan dan Hutan hanya bisa memadamkan api yang berada di atas saja, namun kebakaran yang terjadi dibawah tanah tidak dapat dipadamkan karena tidak mengetahui posisi api berada. Cara untuk mencegah kebakaran bawah tanah terutama yang terjadi pada lahan gambut yaitu dengan mengalirkan air ke tanah tersebut, sehingga saat keadaan lembab tanah tidak terbakar, namun kendalanya adalah saat musim kemarau tidak adanya jumlah air yang besar sehingga sulit untuk mencari sumber air yang besar untuk dialirkan pada daerah yang terbakar dibawah tanah.

¹³ Wawancara dengan Bapak Syahrul, SKM. Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan

tanggal 13 September 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3.2.2. Usulan dan tindak lanjut kebakaran lahan dan hutan.

Setelah melihat berbagai kendala yang terjadi dilapangan, maka perlu usulan yang disampaikan oleh pemadam kebakaran lahan dan hutan kepada pemerintah untuk mengatasi kendala yang dialami dan kegiatan pencegahan dan pemadaman berjalan dengan lancar. Sehingga dapat mengatasi kendala yang dihadapi dan dapat memungkinkan mengecilnya jumlah titik api dan berharap bisa menuntaskan kebakaran lahan dan hutan.

1. Pengawasan dan deteksi api kebakaran lahan dan hutan

Di Kabupaten Rokan Hilir deteksi api menggunakan aplikasi android, namun itu saja tidak cukup. Pemerintah perlu menambahkan sumber informasi disetiap kecamatan sehingga sebelum api membesar tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan bisa tiba dilokasi dengan cepat. Pengawasan bisa berupa patroli dan pos penjagaan. Pada tahun 2015 terdapat pos penjagaan masing-masing satu disetiap kecamatan. Hanya saja pos tersebut berjalan kurang maksimal. Bahkan ada yang sudah tidak berfungsi lagi. Pos penjagaan yang tidak berfungsi berada pada area yang dulunya rawan kebakaran berubah menjadi tidak rawan lagi. Jadi pos tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Pada saat musim kemarau, jika tidak adalagi aliran air yang mengalir dilahan gambut maka akan sangat besar kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan, itulah yang harus di buat oleh pemerintah untuk mengaktifkan kembali pos penjagaan dan melakukan patroli apalagi saat musim kemarau tiba.

2. Peralatan, Perlengkapan, dan Personil kebakaran lahan dan hutan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jumlah peralatan, perlengkapan, dan personil yang masih sangat kurang masih menjadi kendala dalam mencegah kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Rokan Hilir. Jika tidak ada peningkatan pada peralatan, perlengkapan, dan personil, maka kebakaran lahan dan hutan tidak akan dapat dipadamkan. Maka dari itu pemerintah perlu menambah jumlah personil serta peralatan agar dapat berjalan maksimal. Peralatan yang diperlukan seperti memberi mesin air pada setiap kecamatan agar dapat mencegah lahan terbakar sebelum api meluas dan ditambahnya mobil pemadam kebakaran agar Satuan Pelaksana Kebakaran Lahan dan Hutan dapat memaksimalkan kinerjanya untuk memadamkan api pada saat dilokasi kejadian.

3. Komitmen yang tinggi dari semua pihak khususnya organisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan.

Setiap organisasi terkait kebakaran lahan dan hutan harusnya memiliki komitmen yang tinggi akan bahayanya kebakaran lahan dan hutan. Dimana komitmen yang dipegang bukan lagi mengurangi besarnya titik api, melainkan menuntaskan kebakaran lahan dan hutan. Menuntaskan kebakaran lahan dan hutan tidak akan terlaksana apabila masih adanya kendala-kendala yang dihadapi. Oleh sebab itu pemerintah beserta organisasi lainnya harus meningkatkan kemauan dan tekad yang bulat serta meyakini bahwa kebakaran lahan dan hutan dapat dituntaskan serta untuk yang akan datang pencegahan lebih dimaksimalkan agar tidak ada lagi titik api di daerah Kabupaten Rokan Hilir.

4. Melakukan identifikasi sumber-sumber air.

Identifikasi sumber-sumber air akan lebih baik jika pemerintah bisa bekerjasama dengan masyarakat. Masalah yang terdapat dilapangan terkait sumber air ialah sulitnya ditemukan sumber air terdekat sehingga Satuan Pelaksana Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan Tidak bisa mendapatkan air yang banyak untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan. Maka dari itu pemerintah beserta warga setempat bekerjasama untuk menemukan sumber air terdekat terutama pada daerah rawan kebakaran lahan dan hutan sehingga api akan semakin cepat dipadamkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adinugroho, dkk. 2004. Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Bogor:Wetlands International.

Agustino, Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfa Beta.

AG. Subarsono. 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar : Jakarta.

Imron, Ali. 2002 Kebijakan Pendidikan di Indonesia: PT Bumi Aksara, Jakarta.

Nugraha, Indra. 2015. *Menyibak Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terus Berulang*, Jakarta.

Purbowaseso B. 2004. Pengendalian Kebakaran Hutan. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Rachmatsjah O. 1985. Masalah Kebakaran Hutan dan Cara Penanggulangannya. Bogor.

Subagyo, 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Subarsono, AG 2005. *Analisa kebijakan publik konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Subarsono, 2006. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta.

Sugiyono, 2013. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta.

Suyanto, Bangong dan Sutinah, 2011, *Metde penelitian Sosial*, Jakarta : kencana Prenada Media.

Tangkilisan, 2004, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Lukamn Offset : Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2005. *Teori & Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo

Wahab, Solichin Abdul, 2004, *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta

William N. dunn, 1981, *analisa kebijakan* : PT Hanindita, Yogyakarta.

Jurnal :

Destari, Nindya Septi, 2016. *Manajemen Pemerintahan Kabupaten Kuantan Sengingi Dalam Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan*

Tahun 2013-2015, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau.

Edison, Rizki Alta. 2016. Penguatan Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Dalam Penanggulangan Kabut Asap Tahun 2015. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Harun, Shahira, 2016. Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Rokan Hilir Tahun 2010-2013. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Meiwanda, Geovani, 2016. Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Wijaya, Fitra Kusuma, 2013, Analisis Implementasi kebijakan Program Rintisan Sekolah Bertaraf International Di Kota Pekanbaru tahun 2012, Skripsi-s1, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, Pekanbaru.

Peraturan Perundang undangan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2008. Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran (TA) 2007 atas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.

Inpres Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan

Peraturan Bupati no. 31 tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2009 Uraian Tugas Dinas Kehutanan Dinas Provinsi Riau.

Undang Undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah